

Altian & Hilman

PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TERKAIT INVESTASI DI KABUPATEN PONOROGO (STUDI PADA WEBSITE PONOROGORO INVESTMENT SERVICE CENTER)

IMPLEMENT E-GOVERNMENT ONE STOP INVESTMENT SERVICE DEPARTMENT (DPMPTSP) TO PROVIDE INFORMATION RELATED TO INVESTMENT IN PONOROGO REGENCY (STUDY ON PONOROGORO INVESTMENT SERVICE CENTER WEBSITE)

Mohammad Irkham Altian¹, Yusuf Adam Hilman^{2*}

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: 545471adamongis@gmail.com^{2*}

Diterima: 07 Juni 2023; Direvisi: 03 Juli 2023; Disetujui: 06 Juli 2023

ABSTRACT

Through the implementation of e-Gov, the government can prepare public services that are more efficient, transparent and responsive to the needs of the community. The investment potential map in Ponorogo is an initiative of the Ponorogo Regency Government through the One-Stop Investment and Services Agency (DPMPTSP). The electronic basis for investment potential maps in Ponorogo is through the Ponorogo Investment Service Center (PISC) website at <https://pisc.ponorogo.go.id>. Qualitative methods emphasize more on the meaning and in-depth understanding of the phenomenon under study. A qualitative approach was chosen in this study because the researchers considered that the characteristics of this method matched the problems studied, namely the application of E-Government Investment Services and One-Stop Services (DPMPTSP) in providing information related to investment in Ponorogo Regency. This study discusses the UMEGA e-Government Adoption theory which focuses on the use of e-government technology by the community. The goal of public service through e-government is to increase the effectiveness, openness, and accountability of government administration. This study uses The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) theory which includes indicators such as behavioral intentions, performance expectations, business expectations, social influence, facility conditions, perceived risk, and attitudes. Research results from interviews and field observations with five informants, including government officials and users of the Ponorogo Investment Service Center website, support the research focus. there are factors that influence people in using the website. These factors include performance expectations, business expectations, social influence, facility conditions, perceived risk, and attitudes. However, the implementation of e-government in the Ponorogo Regency Investment and One-Stop Service Office is still not optimal. Several informants stated that the community still prefers to get regional investment services directly from the Dinas. Even so, DPMPTSP Ponorogo Regency has implemented e-government services well and disseminated them to the community. Good conditions of network facilities and infrastructure can support the use of the Ponorogo Investment Service Center website. Perceived risk can also be affected by the security of personal identity, transaction and service data. Public attitudes towards the website are also considered positive. Although there are still deficiencies in the implementation of e-government, the use of the Ponorogo Investment Service Center website is considered as the first step in e-government services for regional investment. The development and use of e-government services requires accelerated network infrastructure development. Perceived risk can also affect people's attitudes and behavioral values towards the use of the website.

Keywords: *Implementation ; E-government ; The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA); Ponorogo Investment Service Center.*

ABSTRAK

Melalui penerapan *e-Gov*, pihak pemerintah dapat menyiapkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peta potensi investasi di Ponorogo merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Basis elektronik peta potensi investasi di Ponorogo yakni melalui website Ponorogo Investment Service Center (PISC) di alamat <https://pisc.ponorogo.go.id>. Metode kualitatif lebih menekankan pada makna dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti menganggap bahwa karakteristik metode ini cocok dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penerapan *E-Government* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan informasi terkait investasi di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang teori *Adoption e-Government UMEGA* yang berfokus pada penggunaan teknologi *e-government* oleh masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik melalui *e-government* adalah untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teori *The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA)* yang mencakup indikator-indikator seperti niat perilaku, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi-kondisi fasilitas, resiko yang dirasakan, dan sikap. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi lapangan dengan lima informan, termasuk pejabat pemerintah dan pengguna website Ponorogo Investment Service Center, mendukung fokus penelitian. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan website tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi-kondisi fasilitas, resiko yang dirasakan, dan sikap. Namun, penerapan *e-government* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo masih belum optimal. Beberapa informan menyatakan bahwa masyarakat masih lebih memilih untuk mendapatkan layanan investasi daerah secara langsung ke Dinas. Meskipun demikian, DPMPTSP Kabupaten Ponorogo telah menerapkan pelayanan *e-government* dengan baik dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kondisi-kondisi fasilitas dan infrastruktur jaringan yang baik dapat mendukung penggunaan website Ponorogo Investment Service Center. Resiko yang dirasakan juga dapat dipengaruhi oleh keamanan identitas personal, transaksi, dan data layanan. Sikap masyarakat terhadap website tersebut juga dianggap positif. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam penerapan *e-government*, penggunaan website Ponorogo Investment Service Center dianggap sebagai langkah awal dalam pelayanan *e-government* untuk investasi daerah. Pengembangan dan penggunaan layanan *e-government* ini membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan. Resiko yang dirasakan juga dapat mempengaruhi sikap masyarakat dan nilai perilaku terhadap penggunaan website tersebut.

Kata kunci: *Penerapan; E-government; The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA); Ponorogo Investment Service Center.*

PENDAHULUAN

Indonesia selaku bangsa dunia ketiga mempunyai tantangan besar dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan memenuhi kebutuhan administratif yang semakin bertambah, pemerintah perlu melakukan upgrade dan peningkatan dalam pelayanan publik. Suatu usaha yang bisa dilaksanakan yaitu memajukan taraf informasi yang diberikan kepada masyarakat. Informasi agar jelas, akurat, dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam mendapatkan pelayanan publik. Pemerintah dapat menggunakan berbagai media komunikasi, seperti situs web resmi, media sosial, brosur, dan lain sebagainya untuk menyediakan informasi yang lengkap dan terkini. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan efisiensi dan kecepatan

dalam proses penyajian transparansi masyarakat. Penggunaan percepatan teknologi informasi dan komunikasi mampu mendukung meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan mengurangi waktu tunggu masyarakat. Contohnya, pemerintah dapat mengimplementasikan sistem pelayanan online atau layanan berbasis digital untuk memudahkan akses dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Selanjutnya, penting juga bagi instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik.

Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan keluhan yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Mekanisme seperti pengaduan publik, forum diskusi, atau partisipasi dalam rapat-rapat terbuka dapat digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat. Terakhir, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di instansi pelayanan publik juga penting. Pegawai yang kompeten dan profesional akan mampu memberikan penyajian informasi maupun layanan yang maksimal untuk khalayak masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, peningkatan kompetensi, penghargaan kepada yang berprestasi sekaligus pihak Dinas yang berhubungan. Sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Secara keseluruhan, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia membutuhkan upaya yang komprehensif dari pemerintah. Secara untuk mengedepankan informasi yang baik, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan lebih baik.

Electronic Government (e-Gov) atau pemerintahan elektronik merupakan kata lain yang digunakan guna menggambarkan eksploitasi manfaat teknologi digital oleh pemerintah untuk menyediakan layanan dan memfasilitasi hubungan relasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak bersangkutan lainnya. Bank Dunia (World Bank) mengartikan atau mendeskripsikan e-Gov serupa dengan pengimplementasian teknologi sebagaimana wide area network (jaringan luas), internet, dan mobile computing guna mengalihkan relasi jeda penguasa dan berbagai pihak tersebut. Melalui penerapan e-Gov, pihak pemerintah dapat menyiapkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh layanan e-Gov yang umum meliputi pengajuan perizinan secara online, pembayaran pajak elektronik, layanan kesehatan online, pengarsipan elektronik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Pemanfaatan teknologi digital dalam e-Gov memiliki potensi untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan secara keseluruhan, selain itu, e-Gov juga dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan mekanisme pengambilan kesepakatan pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi e-Gov juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi di antara masyarakat, masalah keamanan data, dan perlindungan privasi. Oleh sebab itu, penting bagi pihak pemerintah untuk menguasai tantangan ini dan memastikan bahwa e-Gov dapat membagikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan berbagai pihak bersangkutan. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi e-Gov. Salah satu

tantangan utama adalah kesenjangan akses teknologi di antara masyarakat. Meskipun teknologi digital semakin berkembang, masih ada sebagian penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat teknologi. Oleh Sebab itu, penting bagi pihak pemerintah guna membenarkan bahwa akses teknologi merata dan menyeluruh agar semua warga dapat memanfaatkan layanan e-Gov. Masalah keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi isu penting dalam e-Gov. Dengan pertukaran informasi yang melibatkan data pribadi antara pemerintah dan masyarakat, penting untuk memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif tersebut. Perlindungan privasi dan transparansi dalam pengelolaan data juga harus diperhatikan agar masyarakat merasa aman dan percaya dalam menggunakan layanan e-Gov, selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan dalam e-Gov memiliki keandalan dan kapasitas yang memadai. Gangguan teknis atau kegagalan sistem dapat menghambat akses dan penggunaan layanan e-Gov, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitasnya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat mengadopsi strategi seperti investasi dalam infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan layanan e-Gov. Dengan melakukan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat dari pemerintahan elektronik dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih besar. Beberapa kendala yang dihadapi dan ditemukan sebelumnya dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan atau penerapan e-Government di Indonesia. Biaya, implementasi e-Government memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Terkadang, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam mengembangkan dan memelihara sistem e-Government yang efektif. Sumber daya manusia, Pengembangan e-Government memerlukan tenaga ahli yang mampu mengetahui pemahaman dan rekognisi dalam aspek teknologi informasi. Kurangnya kuantitas dan tingkat sumber daya manusia yang ditemui dapat menjadi kendala untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem e-Government yang efektif. Program kerja yang jelas, Implementasi e-Government memerlukan perencanaan yang matang dan program kerja yang jelas. Terkadang, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pengguna dan kurangnya perencanaan yang baik dapat menyebabkan implementasi e-Government yang tidak sesuai dengan harapan. Waktu implementasi, Implementasi e-Government adalah proses yang rumit dan memerlukan tempo yang terlalu lamban. Terkadang, keterbatasan waktu yang tersedia menjadi kendala dalam mengembangkan dan meluncurkan sistem e-Government yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Partisipasi masyarakat, Keberhasilan e-Government juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan dan dukungan terhadap program ini. Memastikan partisipasi yang efektif dari masyarakat memerlukan upaya yang tepat dalam melakukan sosialisasi dan pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik melalui e-Government.

Peta potensi investasi di Ponorogo merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP). Peta ini dirancang sebagai sarana guna membagikan penyajian laporan atau berita yang komprehensif terhadap investor mengenai kapasitas investasi yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. Ada beberapa poin urgensi mengenai peta potensi investasi di Ponorogo, peta tersebut dibuat untuk memberikan informasi kepada investor mengenai berbagai potensi penanaman modal yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tujuannya ialah untuk memudahkan investor guna mengakses atau mencari dan menganalisis peluang investasi di daerah tersebut. Basis elektronik peta potensi investasi di Ponorogo yakni komposisi penyajian data informasi berdasarkan elektronik, yang bisa dibuka melalui website Ponorogo Investment Service Center (PISC) di alamat <https://pisc.ponorogo.go.id>. Melalui peta ini, investor dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan tanpa harus secara fisik datang ke lokasi.

Informasi yang tersedia peta potensi investasi akan menyajikan informasi mengenai fokus koordinat kapasitas investasi atau penanaman modal dari beragam bidang. Hal ini mencakup sektor industri, pariwisata, pertanian, infrastruktur, dan sektor lainnya yang memiliki peluang investasi di Kabupaten Ponorogo. Informasi tersebut meliputi deskripsi potensi, data demografis, fasilitas dan layanan yang tersedia, kebijakan investasi, dan kontak penting untuk menghubungi pihak terkait. Akses Informasi yang Mudah, Dengan menggunakan peta ini, investor dapat dengan mudah mencari potensi investasi yang mereka minati. Mereka dapat mengeksplorasi daerah-daerah tertentu, melihat detail potensi investasi, dan memperoleh informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dukungan dalam Pengambilan Keputusan, peta potensi investasi di Ponorogo didesain untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan lokasi investasi. Informasi yang disajikan secara komprehensif dan terstruktur akan mempermudah investor dalam mengevaluasi potensi dan risiko investasi di daerah tersebut.

Melalui peta potensi investasi ini, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berharap dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah mereka dan membagikan pelayanan yang lebih unggul dan cepat kepada calon investor. Selain itu, peta atau website ini juga menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam menjawab tantangan era digital dan mempromosikan potensi daerah di skala yang lebih luas. Website PISC (Ponorogo Investment Service Center) merupakan sebuah inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mendorong investasi di wilayah tersebut. Melalui website ini, lembaga pemerintah daerah ingin memberikan informasi yang lengkap dan mudah diakses kepada para investor yang berminat untuk berinvestasi di Ponorogo. Website ini merupakan konsolidasi berupa digitalisasi dari Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, investor dapat melihat proyeksi dan potensi investasi di Kabupaten Ponorogo secara online. Informasi mengenai peluang investasi yang ditampilkan di website ini telah legal dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Ponorogo Investment Service Center PISC juga bertujuan untuk memperkenalkan potensi investasi di berbagai sektor, seperti lingkungan hidup, pariwisata, perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Lokasi peluang investasi telah ditentukan secara strategis berdasarkan sektor investasi tersebut. Melalui website

ini, Pemerintah Daerah ingin memikat ketertarikan para penyandang modal untuk menanam modal atau berinvestasi di Ponorogo agar membantu dalam menciptakan ekonomi daerah. Selain itu, melalui PISC, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo juga ingin menerapkan dan mengimplementasikan Electronic Government (e-Gov) dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan efisiensi serta transparansi layanan pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan adanya website PISC, diharapkan komunikasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif. Investor atau orang yang ingin menanamkan modal bisa dengan mudah membuka dan mendapatkan penyajian informasi yang dibutuhkan mengenai peluang investasi di Ponorogo, sementara pemerintah daerah dapat mempromosikan potensi investasi yang dimiliki oleh kabupaten tersebut. Ponorogo Investment Service Center (PISC) adalah sebuah website yang dibentuk dengan tujuan membantu pemerintah dalam menangani isu-isu strategis terkait dengan aplikasi e-government. PISC memiliki beberapa flagship program yang menjadi agenda utama untuk diwujudkan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai setiap program tersebut E-Dukasi, Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan di Ponorogo melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). E-Dukasi meliputi pengembangan infrastruktur digital di sekolah-sekolah, pengembangan kurikulum berbasis TIK, pelatihan guru dalam pemanfaatan TIK, dan pembangunan konten pendidikan digital.

E-Learning, Program e-Learning berfokus pada pengembangan platform dan sistem pembelajaran online yang bisa dilihat oleh semua kalangan masyarakat baik dari mahasiswa, investor, dan pengusaha. Dengan e-Learning, diharapkan pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel dan cepat, baik walaupun sistem percepatan informasi masih tahap pengembangan. Sistem ini dapat mencakup materi pembelajaran interaktif, dan penilaian secara digital. Legal Investment, Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan investasi yang aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Ponorogo. PISC akan membantu investor dalam proses administrasi, perizinan, dan pengaturan investasi yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Legal Software: Program ini fokus pada pengembangan perangkat lunak (software) yang legal dan berkualitas. PISC akan memberikan akses dan dukungan kepada pengembang perangkat lunak lokal untuk mematuhi hukum dan lisensi yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan inovasi di bidang teknologi informasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

Standar Kompetensi Profesi: Program ini bertujuan untuk mengembangkan standar kompetensi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. PISC akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri untuk menyusun kurikulum dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di era digital. Sumber Daya Manusia TIK, Program ini titik koordinat pada perkembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengenalan, promosi website PISC akan tersedia dengan pelatihan, workshop, dan program pengembangan keterampilan

untuk mendorong peningkatan kompetensi dan pengetahuan di bidang TIK. Melalui Ponorogo Investment Service Center dan program-programnya, diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dalam mengatasi isu-isu strategis terkait dengan website e-government dan mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan di Ponorogo.

Penelitian ini memiliki pendalaman variasi unsur penelitian dianalogikan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek, Ruang Lingkup yang Lebih Spesifik, Kajian ini lebih memfokuskan pada penerapan e-government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam memberikan informasi investasi di Kabupaten Ponorogo. Penelitian sebelumnya membahas secara umum mengenai pelayanan publik di DPM-PTSP. Fokus yang lebih terperinci pada aspek lingkungan hidup, pariwisata, perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi perbedaan signifikan dalam penelitian ini. Perilaku Masyarakat atau Pengguna Layanan: Penelitian ini lebih berfokus pada perilaku masyarakat atau pengguna layanan website e-government. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mungkin lebih berfokus pada aspek kebijakan atau implementasi pemerintah. Pendekatan Teoritis, Penelitian ini menerapkan teori The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) untuk menjabarkan beberapa faktor yang berdampak dan mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan Website Ponorogo Investment Service Center. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan teoritis yang diaplikasikan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan unsur penelitian yang mencakup ruang lingkup yang lebih spesifik, fokus pada perilaku pengguna layanan, dan penggunaan pendekatan teoritis yang berbeda. Hal-hal ini memperkaya pemahaman dan kontribusi penelitian terhadap konteks penerapan e-government di DPM-PTSP Kabupaten Ponorogo. Judul penelitian adalah "PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TERKAIT INVESTASI DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Pada Website Ponorogo Investment Service Center)".

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana and Widodo 2020) berjudul "Inovasi Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik" membahas tentang adanya inovasi dalam penyediaan pelayanan publik di Kota Probolinggo. Penelitian ini menyoroti pentingnya mal pelayanan publik sebagai sarana untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, DPM-PTSP menggunakan OSS (Online Single Submission), sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempermudah proses perijinan masyarakat melalui penggunaan media sosial. Dengan adanya OSS, masyarakat dapat mengajukan permohonan perijinan secara online dari rumah masing-masing dan kemudian diajukan ke DPM-PTSP untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Hal ini menghindarkan masyarakat dari proses yang rumit dan memakan waktu dalam mengurus perijinan.

Penelitian (Witdianto et al. 2022) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Pengembangan E-Government Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa melalui implementasi Perbup Nomor 88 Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil menciptakan beberapa layanan berbasis digital. Beberapa layanan tersebut antara lain adalah Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIJITU), dan Ponorogo Investment Service Center (PISC).

Penelitian (Aditya et al. 2022) dalam penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Ponorogo Pada Pelayanan E – Ktp”. berfokus pada upaya peningkatan pelayanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam hal pelayanan terkait dengan E-KTP di kantor DUKCAPIL MPP PCC Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik PCC Ponorogo, terutama dalam hal pelayanan E-KTP.

Penelitian (Setianegara 2022) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Terpadu Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Disdukcapil] Kabupaten Lamongan)”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan publik dalam hal ini menjadi isu strategis di masyarakat modern melalui adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan.

Penelitian (Bilyastuti 2019) dalam penelitian yang berjudul “Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)”. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi SIJITU sebagai sistem perizinan terpadu belum mencapai tingkat adopsi yang optimal oleh masyarakat. Untuk meningkatkan penggunaan aplikasi perizinan online, pemerintah daerah dan instansi terkait dapat melakukan upaya dalam hal promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan sistem perizinan online ini. Selain itu, juga perlu ditingkatkan infrastruktur jaringan internet di daerah-daerah terpencil agar akses internet lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pemahaman fenomena sebagai subjek penelitian dan dilakukan dengan cara memvisualkan gerakan, keinginan, pendapat, dan lain-lain, serta menceritakan dalam bentuk ungkapan kata secara ilmiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Dalam metode kualitatif, angka tidak diperlukan, akan tetapi penelitian ini memandang fenomena sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Lexy J 2010). Pegimplementasian metode kualitatif dalam penelitian ini mendukung penulis untuk menggabungkan data

Penerapan *E-Government* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Dalam Memberikan Informasi Terkait Investasi Di Kabupaten
Ponorogo
(Studi Pada Website Ponorogo *Investment Service Center*)

Altian & Hilman

dari berbagai informasi yang berhubungan dengan menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan manusia. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme, dan digunakan untuk meneliti objek alamiah. Dalam metode ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu penggabungan beberapa sumber data. Lokasi penelitian ini dilakukan di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang paling dapat memberikan informasi yang digunakan informan (Sugiyono 2010).

Tabel 1.
Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan	Alasan
1.	Retno Dewi Cahyani, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kerja Sama	Ibu Retno Dewi Cahyani adalah selaku Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama. Beliau merupakan yang menangani dalam bidang pekerjaan proses hubungan terkait investasi maupun penanaman modal dan mengelola <i>website PISC</i> dalam lingkup Kabupaten Ponorogo.
2.	Sugeng Haryogi, SE, MM	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Bapak Sugeng Haryogi, SE, MM selaku tim ahli atau Sub koordinator Perencanaan dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan salah satu penggagas ide <i>website PISC</i> dan mengelola <i>website</i> terkait investasi di Kabupaten Ponorogo.
3.	Citra Dini Paramitasari, SE	Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama	Ibu Citra Dini Paramitasari, SE adalah sebagai Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama. Dikarenakan beliau yang sering menangani dalam proses hubungan terkait bidang pekerjaan koordinator promosi dan kerjasama investasi maupun pengenalan <i>website</i> dalam lingkup OPD di Kabupaten Ponorogo.
4.	Septian Tri Nugroho	Masyarakat, Pengusaha Budidaya Agroindustri Porang, Pengguna Website	Septian Tri Nugroho adalah petani pengembang budidaya sekaligus agroindustry bibit tanaman porang, melihat perkembangan investasi daerah melalui penggunaan <i>website PISC</i> memungkinkan untuk menjadi pengguna <i>website</i> .
5.	Anang Hengki Mahendra, SE	Masyarakat, Peternak Sapi Perah, Pengguna Website	Anang Hengki Mahendra adalah Peternak Sapi Perah dan Pengusaha Peternakan dan merupakan pengusaha milenial yang mengerti investasi daerah.

Sumber : Data Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mohammad Irham Altian 2023.

Pemilihan informan yang tepat dan relevan dengan penelitian akan membantu dalam memperoleh informasi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman. Selain itu, untuk menjelaskan tujuan penelitian kepada informan, menghormati kerahasiaan dan privasi mereka, serta memperhatikan etika penelitian yang berlaku. Informan dari penelitian ini berjumlah lima orang. Peneliti memilih ketiga pegawai dinas dan dua pelaku usaha atau masyarakat sebagai informan, dikarenakan ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan kesesuaian pada profesi.

Data Primer: Dalam penelitian ini, sumber data yang akan diperlukan adalah data primer yang diterima secara langsung melalui wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo. Penulis melakukan wawancara tatap muka langsung dengan pihak informan yang bersangkutan atau pihak informan terkait untuk memperoleh informasi yang akurat tentang investasi yang dibutuhkan. **Data Sekunder:** Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti skripsi terdahulu, Undang-Undang, buku literatur, dokumen hasil penelitian, dan data dari kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Data sekunder ini dapat digunakan untuk memperoleh pengertian yang lebih leluasa dan merasuk tentang topik penelitian, serta untuk membandingkan dan memvalidasi data primer yang diperoleh. Observasi adalah proses teratur menurut sistem dalam merekam motif perbuatan manusia, objek, dan kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap penerapan e-government melalui website di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan. Hasil pengamatan observasi kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara terperinci, kronologis, dan structural (Tobing, M. pSI 2011). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendetail tentang keterlibatan dan menerapkan situasi dan fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui observasi (Sugiyono 2010). Dokumentasi adalah teks dan dokumen tertulis sebagai metode dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan dokumen yang telah diumumkan, seperti jurnal, buku, surat kabar/koran, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Dokumen yang digunakan harus dipastikan otentik dan relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan metode dokumentasi, penulis dapat menggali pikiran seseorang yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut. Metode ini juga membantu meningkatkan pemahaman terhadap topik penelitian dan memberikan analisis mendalam terhadap isi dan makna dokumen yang digunakan (Sugiyono 2010).

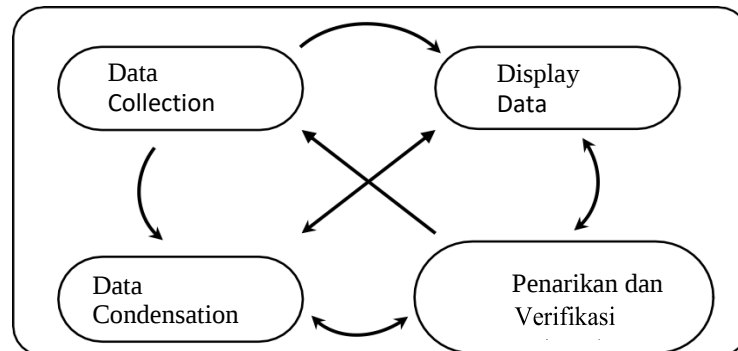
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pemahaman fenomena sebagai subjek penelitian dan dilakukan dengan cara memvisualkan gerakan, keinginan, pendapat, dan lain-lain, serta menceritakan dalam bentuk ungkapan kata secara ilmiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Dalam metode kualitatif, angka tidak diperlukan, akan tetapi penelitian ini memandang fenomena sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Lexy J 2010). Model analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana merupakan salah satu pendekatan yang umum diperlukan guna analisis data

Altian & Hilman

kualitatif. Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap komponen dalam model interaktif (Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana 2014).

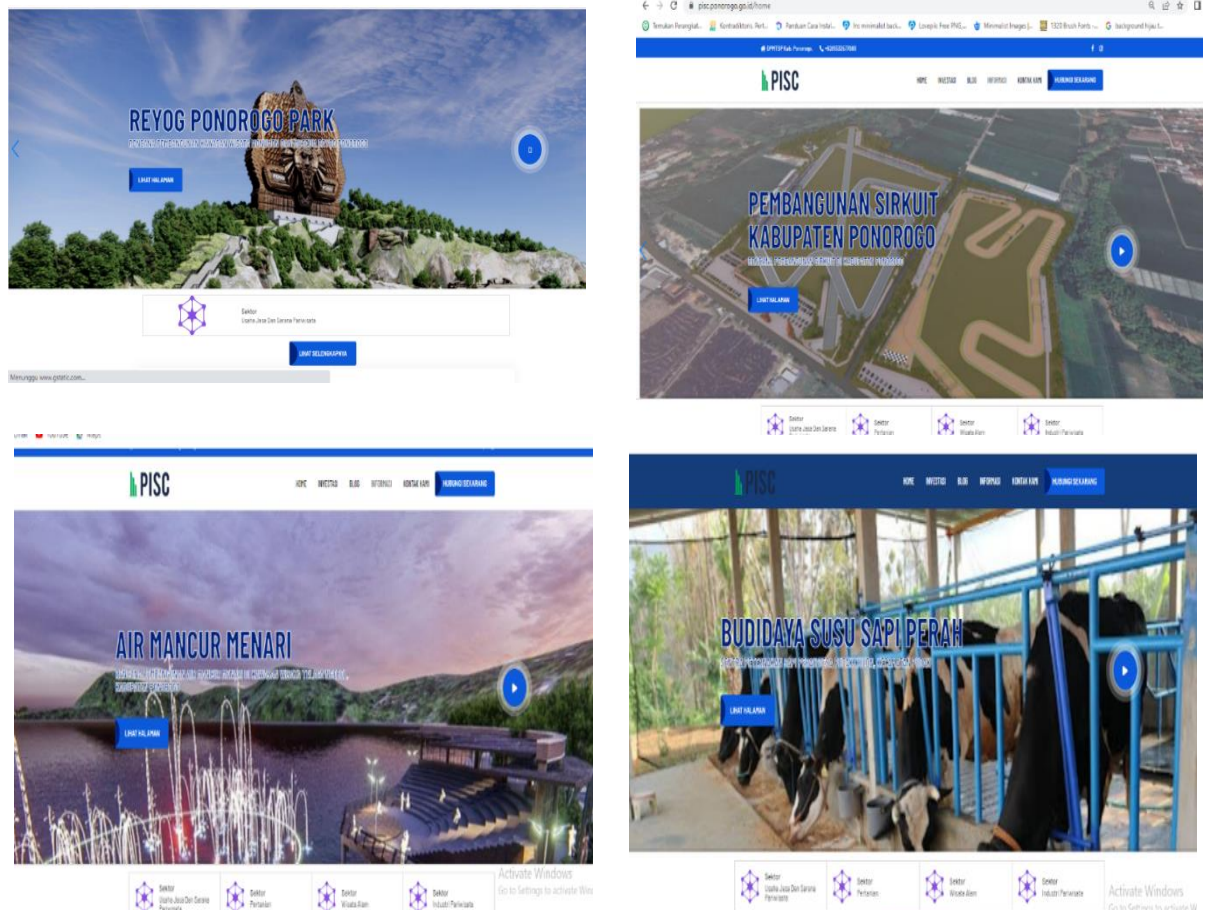
Penerapan *E-Government* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Memberikan Informasi Terkait Investasi Di Kabupaten Ponorogo
(Studi Pada Website Ponorogo *Investment Service Center*)

Altian & Hilman



Gambar 1.
Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber : (Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2.
Halaman Website *Ponorogo Investment Service Center*
Sumber Website: <https://pisc.ponorogo.go.id/home>

Penerapan *E-Government* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Dalam Memberikan Informasi Terkait Investasi Di Kabupaten
Ponorogo
(Studi Pada Website Ponorogo *Investment Service Center*)

Altian & Hilman

Tabel 2.

Jumlah Potensi Investasi Yang Masuk Aplikasi Utama Website PISC				
NO	SEKTOR	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI	LOKASI
1.	Lingkungan Hidup	-	-	-
2.	Pariwisata	Usaha Jasa Dan Sarana Pariwisata – REYOG PONOROGO PARK	Rp. 300.000.000.000	Sampung, Sampung, Kabupaten Ponorogo
		Usaha Jasa Dan Sarana Pariwisata – AIR MANCUR MENARI	Rp. 15.000.000.000	Ngebel, Kabupaten Ponorogo
		Usaha Jasa Dan Sarana Pariwisata – PEMBANGUNAN SIRKUIT KABUPATEN PONOROGO	Rp. 10.291.800.000	Kadipaten, Babadan, Kabupaten Ponorogo
		Wisata Alam – TELAGA NGEHEL	1	Gondowido, Ngebel, Kabupaten Ponorogo
		Wisata Buatan – TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI “WENGKER PARK”	1	Cokromenggalan, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
		Usaha Jasa Dan Sarana Pariwisata – USAHA JASA DAN SARANA PARIWISATA PUNCAK GUNUNG	1	Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
		Industri Pariwisata – INDUSTRI PARIWISATA SUNGAI	1	Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
		Wisata Buatan – WADUK BENDO	1	Ngindeng, Sawoo, Kabupaten Ponorogo
		Wisata Budaya – WISATA BUDAYA	1	Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
		Usaha Jasa Dan Sarana Pariwisata – USAHA JASA DAN SARANA PARIWISATA	1	Kspn Karst Pacitan –Kspp Selingkar Wilis, Kabupaten Ponorogo
3.	Perdagangan	Industri Pariwisata – INDUSTRI PARIWISATA	1763267	Kabupaten Ponorogo
		Perdagangan – BATIK PEWARNA ALAM	1	Nambak, Bungkal Kabupaten Ponorogo
		Budidaya –		Ngrayun,

Penerapan *E-Government* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Dalam Memberikan Informasi Terkait Investasi Di Kabupaten
Ponorogo
(Studi Pada Website Ponorogo *Investment Service Center*)

Altian & Hilman

4.	Pertanian	AGROINDUSTRI PORANG	1	Kabupaten Ponorogo
		Budidaya - TEMBAKAU	1	Badegan, Kabupaten Ponorogo
		Budidaya – KOPI THOES (ROBUSTA)	1	Ngebel, Kabupaten Ponorogo
		Budidaya – DURIAN KANJENG	1	Ngebel, Kabupaten Ponorogo
		Budidaya – PISANG CAVENDISH KUALITAS EKSPOR	1	Pulung, Pulung, Kabupaten Ponorogo
5.	Peternakan	Peternakan – SUSU SAPI PERAH	1	Pudak, Kabupaten Ponorogo
6.	Perikanan	Perikanan – IKAN KOI JENIS GHOSIKI & BUDO GOROMO	1	Serag, Pulung, Kabupaten Ponorogo

sumber Website: <https://pisc.ponorogo.go.id/home>

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil penguraian peneliti berlandaskan data serta fakta yang peneliti peroleh tanpa perantara di lapangan serta diselaraskan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) yang terdapat tujuh konseptual E-Government UMEGA sebagai menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan Website Ponorogo Investment Service Center, Adaption E-Government UMEGA, terdapat tujuh jenis yaitu :

Tabel 3.
Teori dan Indikator *e-government* UMEGA

No.	Variable	Indikator
1.	Niat Perilaku (<i>E-Government</i>), <i>Electronic Government</i>	a. Pengguna menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> untuk mendapatkan layanan informasi secara online b. Pengguna menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi secara online c. Pengguna menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan secara elektronik
2.	Ekspektasi Kinerja (<i>Performance Expectancy</i>)	a. Menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> menjadikan pekerjaan lebih cepat b. Menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> menjadi efektif dalam proses layanan informasi secara online c. Menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service</i>

Penerapan *E-Government* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Dalam Memberikan Informasi Terkait Investasi Di Kabupaten
Ponorogo
(Studi Pada Website Ponorogo *Investment Service Center*)

Altian & Hilman

- | | | |
|----|---|---|
| 3. | Ekspektansi Usaha
(<i>Effort Expectancy</i>) | Center meningkatkan kualitas kinerja pengguna
a. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> mudah untuk di pelajari
b. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> mudah untuk diakses
c. Prosedur penggunaan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> mudah untuk dipahami |
| 4. | Pengaruh Sosial <i>Social Influence</i>) | a. Keluarga/teman/lingkungan mempengaruhi pengguna untuk menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i>
b. Sosialisasi Pemerintah mempengaruhi pengguna untuk menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i>
c. Media masa mempengaruhi pengguna untuk menggunakan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> |
| 5. | Kondisi Fasilitas
(<i>Facilitating Conditions</i>) | a. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> memiliki fitur yang lengkap
b. Infrastruktur jaringan mendukung penggunaan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i>
c. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> memiliki konsistensi dan kejelasan informasi. |
| 6. | Resiko yang dirasakan
(<i>Perceived Risk</i>) | a. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> menjamin keamanan identitas personal para pengguna
b. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> menjamin keamanan transaksional para pengguna
c. <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> menjamin keamanan dan keberlanjutan data layanan. |
| 7. | Sikap (<i>Attitude</i>) | a. Pengguna memiliki penilaian baik terhadap <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i>
b. Pengguna memiliki penilaian positif terhadap <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i> sehingga memilih untuk menggunakannya
c. Keterbukaan informasi melalui layanan <i>Website Ponorogo Investment Service Center</i>
d. memberikan kepuasan kepada pengguna |

Sumber : Dwivedi (Dwivedi et al., 2017b)

Teori Adoption e-Government UMEGA berfokus pada pembahasan yang lebih luas, menekankan tidak hanya fenomena yang terkait dengan implementasi layanan pemerintah, tetapi juga pembahasan terkait hubungan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan e-government oleh pengguna atau masyarakat untuk mempelajari, menganalisis, mengukur dan memahami perilaku penggunaan teknologi oleh khalayak umum. Jadi, tujuan dari pelayanan publik tidak hanya untuk menanggulangi persoalan pelayanan publik, tetapi juga bagaimana pelayanan publik tersebut dapat berproses dengan lancar sesuai dengan perkembangan teknologi dan pandangan terbuka tentang teknologi berbasis web, sehingga dapat dimutakhirkan. setingkat dengan negara-negara di dunia yang perkembangan teknologinya maju sangat pesat. Dari proses di atas,

jelaslah bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang cepat, relevan, keterbukaan dan dapat ditanggungjawabkan, diperlukan kebijakan dan skema pengembangan *e-government*, agar teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat karena meluas. penggunaan dan Peluang Penggunaan membuka peluang untuk penanganan yang cepat dan akurat, pengelolaan data dalam jumlah besar dan penggunaan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi (*e-government*) menambah efektivitas, keterbukaan dan tanggung jawab administrasi. Dalam studi ini, peneliti berfokus pada skor sikap dan perilaku kesiapan masyarakat terhadap teknologi Internet, serta referensi yang memengaruhi penggunaan situs web *Ponorogo Investment Service Center*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil wawancara dan observasi lapangan dengan lima informan telah mendukung fokus penelitian yang dilakukan. Kelima informan tersebut adalah Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama DPMPTSP Kabupaten Ponorogo, Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Ponorogo, Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama DPMPTSP Kabupaten Ponorogo, serta dua masyarakat atau pengusaha pengguna website PISC. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA), yang mencakup beberapa variabel yaitu Niat Perilaku, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Pengaruh Sosial, Kondisi-Kondisi Fasilitas, Resiko yang dirasakan, dan Sikap. Peneliti telah menggambarkan teori ini dalam hasil penelitian. kemudian peneliti akan mengikatkan hasil penelitian agar dapat menjawab Rumusan Masalah yang peneliti gunakan sebagai berikut :

Penerapan *e-government* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan informasi terkait investasi di Kabupaten Ponorogo, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan website Ponorogo Investment Service Center. Penelitian ini mengaplikasikan teori ***The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA)*** yang terdapat tujuh konseptual *E-Government UMEGA* sebagai menganalisis faktor-faktor yang berdampak masyarakat untuk menggunakan *Website Ponorogo Investment Service Center*. Pelayanan informasi edukasi berbasis *e-government* di DPMPTSP Kabupaten Ponorogo Pelayanan informasi edukasi berbasis *e-government* di DPMPTSP Kabupaten Ponorogo salah satu nya masih tahap perkembangan yaitu membahas mengenai investasi daerah atau nilai taraf dan kapasitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapat manfaat dari layanan yang sudah ada, jangkauan layanan yang diterapkan, cara pelayanan ini dapat dibuka melalui fungsi portal ke berbagai layanan, dan kenyamanan pengguna untuk mempelajari cara mendapatkan layanan ini. Masyarakat Kabupaten Ponorogo belum dapat memanfaatkan layanan informasi pendidikan berbasis web DPMPTSP dengan sebaik-baiknya karena masih banyak permasalahan seperti jumlah server yang kurang memadai dan infrastruktur jaringan yang kurang kuat untuk mengakses jaringan dimana-mana. Kabupaten Ponorogo, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pemeringkatan daerah berbasis web.

Website Ponorogo Investment Service Center layanan informasi edukasi *e-government* yang sudah diimplementasikan. Menggunakan teori ***The Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA)*** dalam upaya melalui cakupan pelayanan informasi berbasis *website* yang sudah diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Ponorogo :

Ekspentasi Kinerja, menggunakan *website Ponorogo Investment Service Center* menjadi menjadikan pekerjaan lebih cepat, lebih efektif dalam proses layanan informasi online yaitu pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat dalam pelayanan maupun pemrosesan akses informasi dan kebutuhan data lainnya. Pelayanan yang ringan hampir sama dengan efektif dan efisien agar masyarakat sendiri dapat mendapatkan manfaat yang positif dengan implementasi *e-government* dalam hal ini penggunaan *website* sedikit meringkas dan mempermudah pekerjaan pelayanan DPMPTSP. Ekspentasi Usaha, *website Ponorogo Investment Service Center* mudah untuk dipelajari, mudah untuk diakses yaitu *website Ponorogo Investment Service Center* dapat untuk dipelajari oleh pemula atau pun kalangan masyarakat luas. *Website* juga dapat dengan diakses dengan mudah dan terjangkau dengan catatan kita memiliki jaringan internet atau koneksi jaringan. Pengaruh sosial, *Sosialisasi* Pemerintah mempengaruhi pengguna untuk menggunakan *Website Ponorogo Investment Service Center* yaitu promosi dan sosialisasi agar masyarakat menggunakan *website* tersebut, dengan melakukan sosialisasi sesuai prosedur dan memanfaatkan media massa DPMPTSP Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini penerapan *e-government* sampai saat ini masih termasuk kurang optimal, dikarenakan dalam hasil penelitian tersebut bahwa terdapat dan ditemui kurang optimalnya dalam pengimplementasian *e-government* tersebut dan 2 informan masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Ponorogo banyak yang lebih percaya dengan langsung ke Dinas guna memperoleh layanan investasi daerah yang relevan. Namun dikarenakan hal itu terjadi, pihak DPMPTSP Kabupaten Ponorogo sampai saat sekarang tahun 2023 ini sudah menerapkan pelayanan *e-government* dengan baik, sudah dilaksanakan dengan sesuai implementasi yang ada dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa saat ini ada layanan publik yang berbasis *e-government* untuk mengatasi berbagai masalah kendala yang dihadapi. Ekspentasi Kinerja, Ekspentasi Usaha, Pengaruh Sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap dan menghasilkan Nilai Perilaku (masyarakat pengguna *website Ponorogo Investment Service Center*). Kondisi-kondisi fasilitas, Infrastruktur jaringan mendukung penggunaan *Website Ponorogo Investment Service Center*, memiliki konsistensi dan kejelasan informasi. Infrastruktur jaringan merupakan salah satu akses penting dalam pengembangan penerapan *e-government*. Dengan infrastruktur jaringan yang lebih luas maka *website* akan mudah diterima di Kabupaten Ponorogo. Dalam kejelasan dan konsistensi informasi data *website PISC* merupakan *website* yang memiliki data akurat dan legal investasi.

Ekspetansi Usaha, *website Ponorogo Investment Service Center* mudah untuk dipelajari, mudah untuk diakses yaitu *website Ponorogo Investment Service Center* dapat untuk dipelajari oleh pemula atau pun kalangan masyarakat luas.

Website juga dapat dengan diakses dengan mudah dan terjangkau dengan catatan kita memiliki jaringan internet atau koneksi jaringan. Berkaitan dengan penerapan *E-government* masih memiliki banyak kekurangan yang dijumpai, *website PISC* merupakan tahap perkembangan untuk pelayanan maksimal *e-government* untuk investasi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan juga mendukung kesuksesan penerapan program ini. Masyarakat Kabupaten Ponorogo masih belum cukup awan dengan investasi daerah, ini berdampak pada penilaian masyarakat terhadap layanan *website PISC*. Kondisi-kondisi fasilitas memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Ekspektasi Usaha saling mempengaruhi untuk Nilai Perilaku. Resiko yang dirasakan, *Website Ponorogo Investment Service Center* menjamin keamanan identitas personal para pengguna, menjamin keamanan transaksional para pengguna, menjamin keamanan dan keberlanjutan data layanan. Sikap, Pengguna memiliki penilaian baik terhadap *Website Ponorogo Investment Service Center*. memiliki penilaian positif terhadap *Website Ponorogo Investment Service Center* sehingga memilih untuk menggunakannya.

Pengembangan serta menggunakan layanan *E-government Ponorogo Investment Service Center* walaupun masih tahap keberlanjutan dan perkembangan menuju *website* unggulan dengan terintegrasi Kabupaten Ponorogo, *website* sudah memiliki keamanan data yang positif dan baik jika ada kendala atau kebocoran data akan dengan langsung membersamai pihak ketiga untuk pengelolaan kembali data di konfirmasi. Hal ini membuat sikap dan upaya dukungan dari masyarakat lebih positif dengan menggunakan dan menerapkan *website PISC* sebagai *website* informasi edukasi investasi daerah. Resiko yang dirasakan mempengaruhi nilai positif dan signifikan Sikap menuju Nilai Perilaku.

KESIMPULAN

Penerapan *e-government* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam bentuk Website Ponorogo Investment Service Center memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Konsep UMEGA, seperti Niat Perilaku, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Pengaruh Sosial, Kondisi-Kondisi Fasilitas, Resiko yang Dirasakan, dan Sikap, semuanya berperan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan *website* tersebut. Website Ponorogo Investment Service Center memberikan manfaat dalam proses pelayanan informasi online yang cepat, efektif, dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi (*e-government*) meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab administrasi. Meskipun masih ada beberapa kendala dalam penerapan *e-government*, pihak DPMPTSP Kabupaten Ponorogo telah berusaha untuk melakukan implementasi yang baik dan mensosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat. Namun, masyarakat juga masih memiliki beberapa kekhawatiran terkait dengan penggunaan *website* Ponorogo Investment Service Center, terutama terkait keamanan data dan pemahaman tentang investasi daerah. Faktor-faktor seperti Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Pengaruh Sosial, Kondisi-Kondisi Fasilitas, dan Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan *website* Ponorogo Investment Service

Altian & Hilman

Center. Masyarakat memiliki penilaian baik dan positif terhadap layanan tersebut. Pentingnya pengembangan infrastruktur jaringan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang investasi daerah untuk mendukung kesuksesan penerapan e-government dalam pelayanan investasi di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat berkontribusi dalam proses administrasi yang lebih efektif dan transparan. Meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPMPSTP Kabupaten Ponorogo dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap website Ponorogo Investment Service Center menunjukkan potensi yang positif untuk pengembangan dan peningkatan layanan e-government di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Bagas Fadil et al. (2022). "Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Ponorogo Pada Pelayanan E – Ktp."
- Bilyastuti, Mai Puspadyana. (2019). "Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Ponorogo Dengan Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)." *Reformasi* 9(1): 82.
- BPS. (2021). "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo 2021."
- BPS, Ponorogo. (2021). "Kabupaten PONOROGO Dalam Angka Ponorogo Regency in Figures 2022." : 1–316.
- Cahyani, R. D. (2023, Maret Senin). Pengalaman menggunakan website Ponorogo Investment Service Center, selaku Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama. (M. I. Altian, Interviewer)
- Haryogi, S. (2023, Maret Senin). Pengalaman dan penggunaan website Ponorogo Investment Service Center, selaku Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. (M. I. Altian, Interviewer)
- Hasan Alwi. (2007). "Kamus Besar Bahasa Indonesia." (Jakarta: Balai Pustaka) Cet ke-4: 1250.
- Lexy J, Moelong. (2010). "Metode Penelitian Kualitatif."
- Mahendra, A. H. (2023, Mei Jum'at). Penjelasan menggunakan website Ponorogo Investment Service Center dan pengalaman menjadi pengusaha peternak sapi perah. (M. I. Altian, Interviewer)
- Mathematics, Applied. (2016). "E-Government." : 1–23.
- Maulana, A R, and E Widodo. (2020). "Inovasi Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik." di Era

Altian & Hilman

- Revolusi Industri 4. O", *Mall Pelayanan Publik* 4(4): 548–68.
<http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3510>.
- Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, Matthew B. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Nugroho, S. T. (2023, Mei Minggu). Pengalaman menggunakan website Ponorogo Investment Service Center dan selaku pengusaha agroindustri budidaya porang. (M. I. Altian, Interviewer)
- Paramitasari, C. D. (2023, Maret Senin). Pengalaman dan sosialisasi Menggunakan website Ponorogo Investment Service Center, selaku Koordinator Promosi dan Kerjasama. (M. I. Altian, Interviewer)
- Ponorogo, Bupati. 2022. "Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun (2022)." *Perbub Nomor 28 Tahun 2022* 5(3): 248–53.
- RPJMD KABUPATEN PONOROGO. "PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PONOROGO 2016-2021." *PERDA NO.1 2019*: 1–337.
- Setianegara, Dhymas. (2022). "EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN TERPADU PADA MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMONGAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [DISDUKCAPIL] KABUPATEN LAMONGAN)." *Journal of Chemical Information and Modeling, Mall Pelayanan Publik, Disdukcapil* 21(1): 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607><https://doi.org/10.1016/j.jsu.2020.02.034><https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228><https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>
- Statistik, Badan Pusat. (2018). "Ponorogo Dalam Angka 2018." Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- Sugiyono. (2010). "Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d." Bandung Alf: 143.
- Susilarini, Tanti. (2021). "Pengantar Psikodiagnostik III Interview-Wawancara." Bogor: 131. <http://repository.upi-yai.ac.id/4267/1/Fix-Diktat-Interview-Tanti.pdf>.
- Tobing, M. pSI, PSI Leslie. (2011). "Handout-PSY204-Modul-Observasi.Pdf."
- Usman, Setiawan. (2004). "Pengertian Penerapan." : 4–12.
- Witdianto, Wahyu T R I et al. (2022). "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG

Altian & Hilman

PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP)
NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN E-
GOVERNMENT.”